

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KONSERVASI MANGROVE DI PANTAI BUNGIN, MUARA GEMBONG KABUPATEN BEKASI

Sustainable Environment Analysis for Mangrove Conservation in Bungin Beach Pantai Bakti Village Muara Gembong Distric Bekasi Regency

Didik Suhardjito^{2,3)}, Agit Kriswantriyono³⁾, Yulia Puspadewi Wulandari^{3*)}, Riffan Riyadi³⁾, Fardan Aulia³⁾, Tofan Wibisono⁴⁾

¹Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University, Bogor, 16448

²Pusat Kajian Resolusi Konflik dan Pemberdayaan IPB, Kampus IPB Baranangsiang, Bogor 16144

³PT Bumi Resources, Tbk. Bakri Tower Lt 12, Jl HR Rasuna Said, Jakarta 12940

Penulis Korespondensi: yuliawulandari@gmail.com

Abstrak

Kawasan pesisir Pantai Muara Bungin, Muara Gembong, Bekasi merupakan salah satu kawasan rentan abrasi. Tindakan konservasi akan berjalan dengan baik apabila semua pihak bekerjasama dan saling mendukung satu sama lainnya. Oleh karena itu tujuan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat di Pantai Bungin adalah peningkatan kapasitas masyarakat di Pantai Bungin dan mendorong perekonomian Masyarakat di Pantai Bungin. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui beberapa tahap diawali dengan pemetaan sosial masyarakat Dusun Pantai Bungin, dilanjutkan dengan sosialisasi, pelatihan-pelatihan dan pendampingan usaha. Program konservasi mangrove yang dilakukan CARE IPB dan PT Bumi Resources, Tbk saat ini memasuki tahap awal membangun awareness dan pembentukan perilaku. Keberhasilan implementasi program mangrove tidak lepas dari adanya dukungan berbagai pihak.

Kata Kunci: Konservasi mangrove, Muara Gembong, pemberdayaan masyarakat, Pantai Bungin

Abstract

The coastal area of Muara Bungin Beach, Muara Gembong, Bekasi is one of the areas prone to abrasion. Conservation actions will run well if all parties work together and support each other. Therefore, the purpose of community empowerment activities in Bungin Beach is to increase the capacity of the community in Bungin Beach and encourage the economy of the Community in Bungin Beach. Community empowerment activities are carried out through several stages, starting with social mapping of the Pantai Bungin Hamlet community, followed by socialization, training and business assistance. The mangrove conservation program carried out by CARE IPB and PT Bumi Resources, Tbk is currently entering the initial stage of building awareness and forming behavior. The success of the implementation of the mangrove program cannot be separated from the support of various parties.

Key words: Mangrove conservation, Muara Gembong, community empowerment, Bungin Beach

Pendahuluan

Kegiatan konservasi sumberdaya alam harus memperhatikan aspek-aspek biofisik, aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Karena konservasi yang dilakukan secara komperhensif dapat memberikan hasil yang terbaik dalam kurun waktu yang cukup

panjang (Suparmini et al. 2013). Kegiatan konservasi akan berjalan dengan baik apabila semua pihak bekerjasama dan saling mendukung satu sama lainnya. Khususnya keterlibatan masyarakat setempat yang ada di kawasan konservasi. Selain itu pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pemerataan dan menata kawasan konservasi yang ada di lingkungan masyarakat. Menurut Sumodiningrat dalam buku Totok Mardikantok (2013) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Strategi pemberdayaan dalam konservasi Kawasan pesisir dapat dilakukan dengan metode ICZM (*Intregated Coastel Zone Management*). ICZM adalah suatu pendekatan yang menyeluruh yang dikenal dalam pengelolaan wilayah pesisir. ICZM merupakan suatu pedoman untuk mengelola kawasan pesisir secara terpadu. Pada dasarnya ICZM adalah konsep pengelolaan pesisir yang mengikut sertakan peran masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat akan turut merasa memiliki tanggung jawab terhadap kawasan pesisir yang menjadi daerah huniannya. ICZM dan sustainable development menjadi satu kolaborasi yang sangat baik apabila dilaksanakan sesuai dengan aturannya. Dilihat dari konsep dimensinya, ICZM dapat dipandang dari beberapa segi, antara lain dimensi ekologis, sosial ekonomi dan sosial politik (Kristiyanti, 2016).

Kecamatan Muara gembong memiliki potensi ekosistem mangrove yang cukup luas dan dapat dijadikan wilayah penyangga untuk mengurangi potensi dampak pemanasan global. Kawasan hutan mangrove di Muara Gembong relatif cukup baik dan saat ini ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung (Ambinari et al., 2016). Kawasan pesisir Pantai Muara Bungin, Muara Gembong, Bekasi yang status lahannya berupa hutan negara dibawah pengelolaan KPH Bogor, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. Secara administratif, lokasi ini termasuk ke dalam wilayah Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Terdapat degradasi hutan mangrove di dalam kawasan hutan yang berada di Desa Pantai Bakti yang disebabkan oleh perubahan lahan menjadi tambak masyarakat. Degradasi hutan mangrove dapat menyebabkan abrasi pantai karena hilangnya fungsi mangrove sebagai penahan gelombang sehingga hantaman gelombang atau ombak tidak langsung mengenai tepian pantai dan merusak garis pantai. Menurut data BKPH Ujungkrawang (2022), Desa Pantai Bakti mengalami abrasi terluas di kecamatan muara Gembong yaitu sebesar 644,51 ha. Laju abrasi yang cukup tinggi ditambah dengan topografi pesisir Muara Gembong yang landai (dataran rendah dengan elevasi < 50) disinyalir merupakan faktor pendukung terjadinya banjir pasang (rob) dan intrusi air laut dengan frekuensi yang cukup tinggi. Menurut Indriatmoko et al. (2019), hal ini dibuktikan dengan hilangnya 3 dusun desa di sekitar pesisir Muara Gembong dan telah berpindah-pindahannya lokasi tempat pelelangan ikan (TPI) dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga, perlu tindakan rehabilitasi mangrove kawasan Pantai Muara Bungin, Desa Pantai Bakti Muara Gembong dalam rangka mencegah dampak abrasi bagi masyarakat sekitar.

Hasil Penelitian (Putri, Rahma & Rosha, 2022) menyatakan kerusakan wilayah pesisir Kecamatan Muara Gembong dapat terjadi dikarenakan faktor alam maupun akibat perilaku manusia. Adapun faktor kerusakan tersebut yaitu abrasi ataupun bisa disebut juga akresi mengakibatkan terjadinya pergeseran pada garis pantai yang disebabkan oleh arus pantai itu sendiri. Proses pengikisan yang terjadi pada pantai di lokasi penelitian disebabkan oleh arus laut yang cukup besar, dan juga disebabkan oleh gelombang pasang surut air laut yang tinggi. Selain itu, dikarenakan kurangnya keberadaan hutan mangrove yang ada di lokasi tersebut. Salah satu faktor yang juga mempengaruhi rendahnya Tingkat kerapatan mangrove di wilayah dekat laut disebabkan oleh adanya pengaruh gelombang air laut yang terjadi sepanjang tahun yang berkisar rata-rata 0,88-1,55 m. Akibat adanya dorongan dari gelombang tersebut bisa menyebabkan mangrove itu sendiri rusak ataupun punah jika terus menerus dipengaruhi oleh gelombang besar. Selain itu faktor yang menyebabkan rendahnya kerapatan di lokasi dekat laut ialah banyaknya sampah yang terbawa arus yang menyebabkan tumbuhnya vegetasi

mangrove menjadi lambat di daerah dekat laut. Faktor lain yang disebabkan oleh manusia juga adalah degradasi dan pembangunan industri di pesisir pantai juga bisa mengganggu tumbuhnya mangrove ataupun merusak mangrove.

Terjadinya degradasi lingkungan dan kerusakan ekosistem mangrove Muara Gembong secara masif memicu terjadinya bencana ekologi seperti abrasi, sedimentasi, intrusi air laut dan banjir rob (Maulani et al, 2021). Kerugian dampak abrasi yang dirasakan masyarakat pantai Muaragembong rata-rata total kerugian akibat abrasi pantai adalah sebesar Rp.11.625.000/orang/tahun dan sebesar Rp.1.034.625.000/tahun yang meliputi kerugian harta benda dan biaya penimbunan lahan sekitar lokasi tempat tinggal (Melfinna dan Kalsum, 2023).

Program konservasi mangrove oleh PT Bumi Resources, Tbk bermitra dengan CARE IPB dalam hal ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan lingkungan dan sosial ekonomi. Pendekatan lingkungan dilakukan dalam rangka menganalisis kesesuaian lokasi bagi penanaman mangrove. Adapun pendekatan sosial ekonomi dilakukan dalam rangka mengidentifikasi kondisi Masyarakat maupun kelompok Masyarakat di wilayah studi. Hal ini termasuk dalam rangka menemukenali Masyarakat yang dapat menjadi mitra dalam implementasi program. Dengan demikian diharapkan kegiatan konservasi yang dilakukan diharapkan selain memberikan dampak perbaikan terhadap kondisi lingkungan hidup di kawasan pesisir juga mampu membangun awareness dan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas lingkungan. Adapun tujuan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat di Pantai Bungin adalah peningkatan kapasitas masyarakat di Pantai Bungin dan mendorong perekonomian Masyarakat di Pantai Bungin.

Metodologi

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Pantai Bungin Desa Pantai Bakti Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi berlangsung selama 1 tahun mulai dari bulan Juli 2023 hingga Juni 2024. Kegiatan pemberdayaan melibatkan dua kelompok yaitu kelompok Tani Hutan (KTH Mina Bakti) dan Kelompok Wanita Mutiara Bungin Jaya yang merupakan istri nelayan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui beberapa tahap diawali dengan pemetaan sosial masyarakat Dusun Pantai Bungin, dilanjutkan dengan sosialisasi, pelatihan-pelatihan dan pendampingan usaha. Pada kegiatan pemetaan sosial dilakukan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara dan FGD dengan sejumlah stakeholder lokal. Pengumpulan data sekunder pada kajian sosial ekonomi dilakukan melalui pengumpulan data profil desa/monografi desa, data IDM (Indeks desa membangun) maupun data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Bekasi.

Pemetaan sosial di samping dapat mengetahui kebutuhan dasar masyarakat, potensi sumberdaya dan modal sosial masyarakat, juga dilakukan untuk mengenal stakeholder dalam hubungannya dengan keberadaan dan aktivitas pelaku dalam program, mengidentifikasi permasalahan yang dirasakan komunitas dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan menganalisis potensi konflik yang ada pada Masyarakat (Nuryati et al, 2020). Pada pemetaan sosial data yang dikumpulkan diolah secara deskriptif analitis dan data kuantitatif penunjang. Hasil olahan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk melihat fakta yang terjadi. Data kuantitatif digunakan sebagai penunjang informasi untuk memperkuat informasi kualitatif yang dianalisis.

Terkait dengan data sumberdaya sosial, sumber daya alam, sumberdaya finansial dan sumber daya infrastruktur, akan dianalisis dengan pendekatan kerangka *Sustainable Livelihood* didasarkan atas premis dasar sebagai berikut: bahwa hanya lingkungan sosial yang berlanjut (*sustain*) yang akan memberi kontribusi yang positif bagi proses-proses produksi serta tumbuh dan berkembangnya perusahaan dalam jangka panjang. Komponen-komponen yang menjadi modal dasar dari keberlanjutan sumber penghidupan sosial sering diistilahkan sebagai *Pentagon Capital*. *Pentagon capital* menggambarkan hubungan kelima aset (aset manusia, aset alam, aset sosial, aset finansial, dan aset fisik) terhadap akses ke aset yang dimiliki (Saleh, 2014, dalam Saputra et al, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Wilayah

Desa Pantai Bakti merupakan Desa Induk, semula bernama Desa Sukajaya dan merupakan daerah Kemantren yang berkecamatan di Cabang Bungin dan pada tahun 1982 setelah ada Kecamatan Definitif Muaragembong kemudian diadakan pemekaran menjadi tiga Desa yaitu : Desa Pantai Bakti, Desa Pantai Mekar dan Desa Pantai Bahagia. Secara geografis Desa Pantai Bakti dikelilingi oleh perairan, baik yang berbatasan dengan sungai citarum, maupun laut. Desa Pantai Bakti berada pada ketinggian 2 mdpl. Desa Pantai Bakti memiliki wilayah seluas 3.401,76 ha Dimana 79% merupakan areal tambak.

Masyarakat Desa Pantai Bakti didominasi oleh penduduk yang bekerja sebagai nelayan karena letaknya yang berbatasan langsung dengan laut atau wilayah pesisir. Penghasilan masyarakat dari hasil nelayan berkisar antara Rp.100.000,00 hingga Rp.150.000 dalam satu hari tergantung kepada kondisi laut. Nelayan menjual hasil tangkapannya kepada seorang distributor di Desa yang disebut dengan bakul. Bakul membeli hasil tangkapan dari nelayan berupa ikan dan udang untuk kemudian dijual kembali ke pasar yang berada di luar wilayah desa. Pasar yang membeli hasil tangkapan melalui bakul berada di sekitar wilayah Cilincing, Marunda, hingga muara Angke. Penghasilan bakul dalam sehari dapat mencapai Rp.600.000,00 pada saat kondisi laut normal.

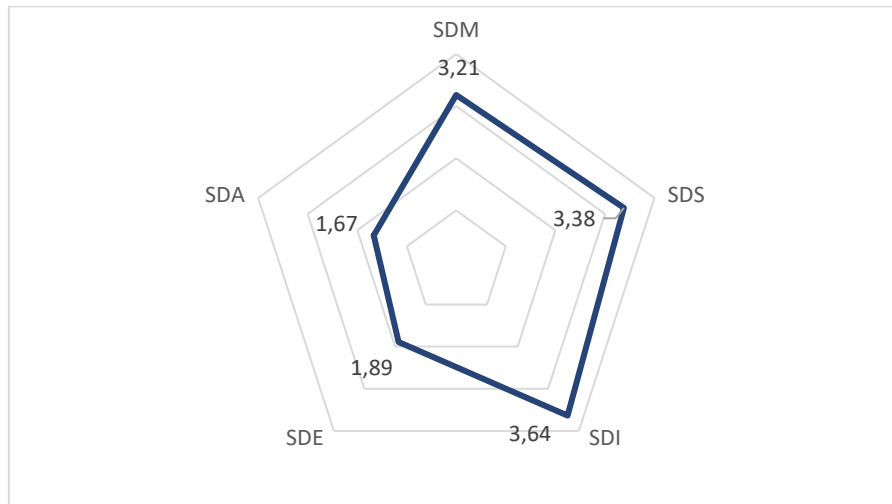
Selain nelayan yang menangkap ikan di laut, terdapat juga masyarakat yang berpenghasilan dengan memanen ikan dan udang di tambak yang banyak ditemukan di lokasi. Sebagian besar wilayah desa dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi tambak budidaya. Tambak masyarakat dibagi ke dalam petak-petak tambak dengan luas tambak berkisar antara 200 m² hingga 20.000 m². Tambak-tambak tersebut diisi oleh budidaya ikan bandeng dan juga udang oleh masyarakat yang memiliki lahan atau menggarap tambak milik orang lain. Waktu yang dibutuhkan bagi petambak ikan bandeng untuk memanen hasil budidaya adalah empat hingga lima bulan tergantung kepada jumlah pakan yang diberikan oleh petani tambak.

Pantai Muara Bungin telah diresmikan sejak tahun 2019 sebagai tempat destinasi wisata, saat awal diresmikannya tempat tersebut, banyak turis yang berkunjung untuk dapat menikmati keindahan pantainya. Hal tersebut sekaligus berperan dalam membangun perekonomian masyarakat sekitar yang bekerja sebagai nelayan. Pengunjung pada umumnya membeli hasil tangkapan nelayan serta membeli makanan UMKM di pesisir pantai, hal tersebut tentunya berdampak positif kepada masyarakat sekitar. Namun demikian kunjungan turis ke pantai Muara Bungin dapat dikatakan menurut drastis semenjak terjadi Pandemi Covid dan banjir rob pada tahun 2019.

Analisis Potensi Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Desa Pantai Bakti

Faktor pendukung utama penghidupan berkelanjutan Masyarakat Desa Pantai Bakti berdasarkan analisis *Sustainable Livelihood Asset* (SLA) adalah aspek sumber daya infrastruktur (SDI). Kondisi ini ditunjukkan dari kondisi aksesibilitas yang cukup baik dari dan menuju Desa Pantai Bakti. Meski lokasi cukup jauh dari ibukota Kecamatan Muara Gembong namun aksesibilitas yang cukup baik menjadi faktor pendorong pengembangan wilayah. Faktor kedua adalah sumber daya sosial. Masyarakat Pantai Bakti yang terdiri dari masyarakat asli dan pendatang sangat terbuka dengan informasi baru maupun kehadiran pendatang baru. Akulturasi budaya juga telah terjadi di wilayah ini.

Kebutuhan pengembangan Masyarakat Pantai Bakti adalah optimalisasi sumber daya alam yang dimilikinya yaitu sumber daya perikanan yang menjadi mayoritas mata pencaharian Masyarakat wilayah ini. Ancaman abrasi dan banjir rob menjadi faktor pembatas terbesar. Bahkan kegiatan abrasi yang terjadi juga menyebabkan hilangnya sebagian lahan tambak di wilayah ini.



Gambar 1. Potensi pernghidupan berkelanjutan Masyarakat Pantai Bakti

Berdasarkan kondisi ini program konservasi mangrove di wilayah Pantai Bakti sangat sesuai dalam rangka perlindungan sumber daya alam wilayah. Oleh karena itu kegiatan konservasi ini perlu dilakukan dengan mengandeng partisipasi masyarakat, serta diikuti dengan pengembangan ekonomi masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa hasil Penelitian menunjukkan keberhasilan dalam rehabilitasi mangrove ditentukan oleh beberapa faktor seperti faktor teknis, kelembagaan, dan faktor sosial ekonomi masyarakat yang terlibat di dalam kegiatan rehabilitasi. Menurut Mamuko et al. (2016), persepsi dan partisipasi merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program rehabilitasi. Persepsi masyarakat perlu diketahui sebagai salah satu faktor pendukung yang penting dalam kegiatan rehabilitasi mangrove.

Pendampingan Program Konservasi Mangrove

Kegiatan implementasi konservasi mangrove di Pantai Muara Bungin diawali pelatihan budidaya mangrove kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Mina Bakti yang yang bergerak di bidang budidaya perikanan tambak. KTH Mina Bakti beranggotakan 20 orang petani dan buruh tani tambak di Pantai Muara Bungin. Ancaman abrasi lahan di lahan tambak milik anggota menjadi permasalahan utama usaha tambak yang dijalankan. Oleh karena itu melalui program konservasi mangrove diharapkan memberikan peluang bagi perbaikan kawasan tambak di wilayah ini.



Gambar 2. Peserta Pelatihan Budidaya Mangrove di Pantai Muara Bungin

Kegiatan penanaman mangrove diawali dengan Pembangunan bedeng pembibitan dan penyiapan bibit yang dilakukan oleh KTH Mina Bakti. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir telah tertanam 10.000 bibit mangrove di area Pantai Bungin.



Gambar 3. Pembibitan Mangrove



Gambar 4. Penanaman Mangrove

Pelatihan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pelatihan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) merupakan bentuk dari pemberdayaan masyarakat pesisir yang bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan mangrove serta menggali potensi kelompok masyarakat. Berdasarkan wawancara singkat dengan Kepala Dusun Pantai Bungin, masyarakat sudah mengetahui beberapa manfaat dari pohon mangrove seperti mengurangi hempasan gelombang di pantai, dan sebagai habitat bagi beberapa jenis satwa seperti biawak (*Varanus salvator*) atau burung kuntul putih (*Ardea alba*), namun masyarakat belum mengetahui pemanfaatan mangrove untuk jadi produk kerajinan HHBK. Produk kerajinan HHBK juga dapat menciptakan nilai ekonomi mangrove agar menjadi sumber mata pencaharian baru bagi masyarakat sekitar. Kegiatan ini diikuti oleh 26 ibu rumah tangga di sekitar Dusun Pantai Bungin.

Jenis HHBK yang dimanfaatkan dalam program ini yaitu kulit dari pohon mangrove berjenis bako-bako (*Rhizophora sp.*) yang dapat dimanfaatkan sebagai zat pewarna bagi kain batik. Pemilihan jenis mangrove ini dikarenakan tingginya ketersediaan sumberdaya yang dapat ditemukan di sekitar dusun. Alat dan bahan yang digunakan dalam pelatihan HHBK bersifat sederhana dan mudah ditemukan di sekitar desa seperti di pasar atau dapat dibeli secara online, hal ini bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah membuat produk olahan secara mandiri pasca-pelatihan.



Gambar 5. Pelatihan HHBK kerajinan batik dari mangrove

Pelatihan Pembuatan Olahan Pangan Bandeng Gepuk

Komoditi bandeng merupakan salah satu usaha yang banyak dikelola oleh masyarakat sekitar Pantai Muara Bungin. Ikan bandeng selama ini hanya dijual dalam bentuk produk basah melalui pengepul. Pengenalan kegiatan pengolahan ikan bandeng menjadi bandeng gepuk bertujuan meningkatkan nilai ekonomi dari hasil tangkapan tambak sebagai alternatif mata pencaharian baru bagi kelompok masyarakat. Sasaran program ini yaitu ibu-ibu di sekitar Dusun Pantai Muara Bungin.



Gambar 6a. Praktek membuat olahan bandeng gepuk Gambar 6b. produk olahan bandeng gepuk

Kegiatan ini diikuti oleh total 42 peserta dari Kelompok PKK Desa dan ibu-ibu di sekitar Dusun Muara Bungin Program pelatihan bandeng gepuk berlangsung dengan lancar dan materi pelatihan dapat diikuti dengan baik oleh seluruh peserta. Hal tersebut dikarenakan peserta pelatihan sudah terbiasa dalam mengolah bandeng dalam aktivitas sehari-hari. Namun, kegiatan pendampingan masih perlu dilakukan dengan tujuan penguatan kelompok. Kegiatan pendampingan yang direkomendasikan yaitu pelatihan pengemasan dan pemasaran produk, pengadaan alat, hingga pembentukan legalitas kelompok

Pelatihan Budidaya Kepiting

Salah satu upaya pemeliharaan bibit mangrove adalah dengan melalui pengelolaan budidaya kepiting bakau. Kegiatan ini merupakan sosialisasi pertama untuk mengenalkan serta meningkatkan minat para petani dalam membudidayakan kepiting bakau menjadi komoditi baru di areal penanaman. Selain itu, komoditi ini dapat bersimbiosis komensalisme antara daun mangrove yang berguguran sebagai pakan kepiting bakau sehingga para petani tidak perlu memberi makan rutin secara semi-intensif kepada kepiting bakau sehingga menjadi komoditi potensial apabila para petani memiliki ketertarikan memanen kepiting yang sebelumnya hanya menjadi nilai ekonomis baru. Kegiatan Pelatihan diikuti oleh KTH Mina Bakti.



Gambar 7. Pelatihan budidaya kepiting bakau

Pelatihan Manajemen Kelembagaan

Program ini dilaksanakan melalui pembentukan kelompok Mutiara Bungin Jaya sebagai kelompok wanita yang berfokus di bidang usaha olahan bandeng dan batik mangrove. Pembentukan kelompok bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Kelompok Mutiara Bungin Jaya dibentuk berdasarkan hasil musyawarah antara CARE IPB, masyarakat, dan kepala Dusun Pantai Bungin. Kelompok ini terdiri dari 30 anggota kelompok yang diketuai oleh ibu Yamih.



Gambar 8. Pembentukan Kelompok Wanita Mutiara Bungin Jaya

Pemasangan Papan Edukasi Mangrove

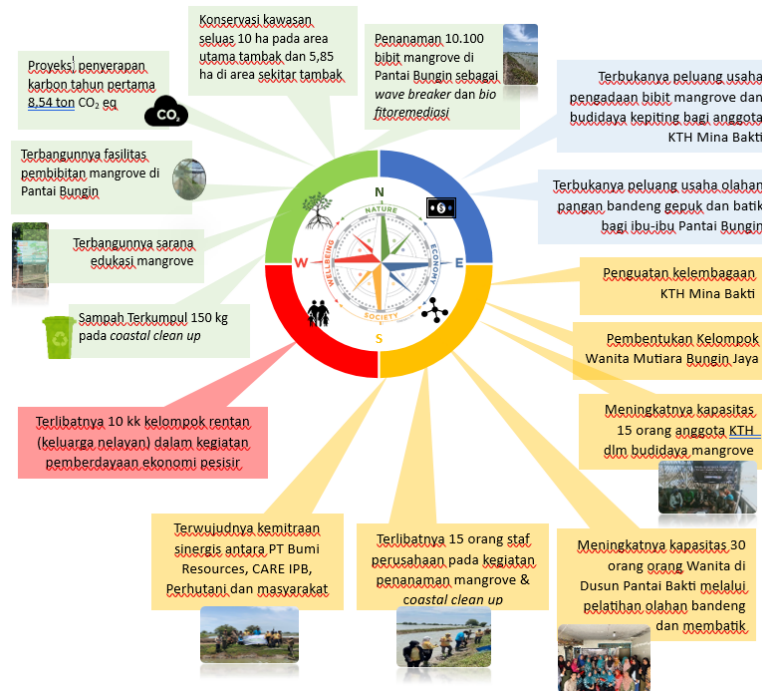
Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat mangrove yang berada di sekitar lokasi pantai. Papan edukasi dipasang di pintu masuk Pantai Bungin, dikarenakan lokasi tersebut merupakan kawasan yang ramai dikunjungi oleh wisatawan dari luar desa. Selain itu, pada lokasi tersebut dapat ditemukan pohon mangrove dewasa dan mangrove remaja hasil dari beberapa kegiatan penanaman yang dilakukan oleh masyarakat dan dapat memudahkan interpretasi pengunjung yang membaca papan edukasi tersebut.



Gambar 9. Papan edukasi mangrove

Capaian Program berdasarkan *Compass Sustainability*

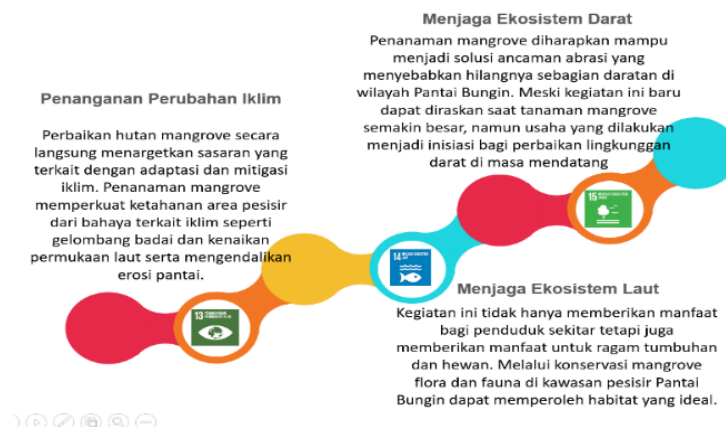
Pengukuran terhadap dampak program dilakukan melalui indicator compass sustainability, dimana dampak program diukur dari empat aspek yaitu aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan. Berikut dampak yang ditimbulkan dari program.



Gambar 11. Area Tambak Masyarakat di Pantai Muara Bungin

Capaian Program berdasarkan *SDGs*

Kontribusi program terhadap pembangunan berkelanjutan secara langsung dapat diukur dari dampak yang diberikan terhadap beberapa indikator TPB atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ditetapkan. Mangrove memegang peranan penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) poin 14, yang berfokus pada tata kelola laut dan pantai secara berkelanjutan.



Gambar 10. Indikator Pencapaian Program Konservasi Mangrove di Pantai Muara Bungin Berdasarkan Keterkaitan dengan SDGs

Kesimpulan

Terdapatnya potensi sumber daya alam yang cukup besar dan belum termanfaatkan secara optimal menjadi modal utama dalam menyusun program pemberdayaan di Pantai

bungin. Meskipun abrasi menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat, namun hal ini pula yang menjadi faktor pendorong partisipasi masyarakat pada konservasi mangrove di Pantai Bungin. Program konservasi mangrove yang dilakukan CARE IPB dan PT Bumi Resources, Tbk saat ini memasuki tahap awal membangun awareness dan pembentukan perilaku. Keberhasilan implementasi program mangrove tidak lepas dari adanya dukungan berbagai pihak antara lain dukungan Pemdes Pantai Bakti dan komunitas Dusun Pantai Muara Bungin sebagai penerima manfaat utama dari program, dukungan dari pihak Perhutani dalam pemberian izin penggunaan lahan dan pendampingan program melalui monev. Kemitraan dengan KTH Mina Bakti tidak kalah penting yang memiliki kontribusi besar dalam mendukung pelaksanaan penanaman di lokasi.

Daftar Pustaka

- Ambinari, M., Darusman, D., Alikodra, H.S., & Santoso, N. 2016. Penataan Peran Para Pihak dalam Pengeloaan Hutan Mangrove di Perkotaan : Studi Kasus Pengelolaan Hutan Mangrove di Teluk Jakarta. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 13(1):29-40.
- Indriatmoko, M.H. Jayawiguna & Riswanto. 2019. Karakteristik dan Indeks Kerentanan Mangrove di Pesisir Kecamatan Muara Gembong. Jakarta, AMAFRAD Press - Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
- Kristiyanti, M. 2016. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Melalui Pendekatan ICZM (*Integrated Coastal Zone Management*). Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank. Hal 752-760.
- Mardikanto, Totok. 2013. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Penerbit Bandung Alfabeta. Bandung
- Maulani, A., Taufiq, N., Partikto, I. 2021. Perubahan Lahan Mangrove di Pesisir Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat. *Journal of Marine Research*, Vol 10 (1) :55-63.
- Melfinna dan Kalsum, S.U. 2023. Abrasi Pantai di Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi. *Jurnal BDI*, Vol 2 (2) : 1-6.
- Nuryati, R., Sulistyowati, L., Setiawan, I., dan Noor, T.I. 2020. Pemetaan Sosial (*Social Mapping*) Masyarakat Dalam Upaya Mendukung Pengembangan Usahatani Polikultur Perkebunan Terintegrasi (UTPPT). *Jurnal Agristan*, Vol 2 (1) : 1-20.
- Putri K.A, Rahma A.C, dan Rokhsa P. 2022. *Klasifikasi Data Mining Dalam Analisis Data Perubahan Lahan Mangrove di Pesisir Muara Gembong*. PENA Akuatika : Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan. Vol. 21 (1) : 15-28.
- Saputra, R.M.K.L., Wijayanti, W.P., Dinanti, D. 2019. Kajian Penghidupan Berkelanjutan (*Sustainable Livelihood*) Di Kelurahan Pasawahan, Kabupaten Bandung. *Planning for Urban Region and Environment*, Vol 8 (3) : 265-274.
- Suparmini et al. 2013. Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol 18 (1) : 8-22.
DOI: <https://doi.org/10.21831/hum.v18i1.3180>